

PEMBUATAN STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS KAMPUNG MANDIRI JAYA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

**Rulan L Manduapessy, Helensia Limbong Bulaan, Karniati Sanda Pare,
Nur Najmiati, Yobelina Tanlain**

Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan

Jl. Hasanuddin, Kabupaten Mimika, 99910, Indonesia

gulanmanduapessy01@gmail.com, helensialimbong@gmail.com,

Karniatisanda71@gmail.com, nurnajmiati17@gmail.com, ushytanlain@gmail.com

Abstract

The establishment of the organizational structure of the Kampung Mandiri Jaya Management is a strategic effort to enhance village governance that is participatory, transparent, and accountable. This study aims to examine how a well-planned organizational structure, tailored to local needs, can strengthen institutional capacity and improve the effectiveness of public services. Using a qualitative descriptive approach, the research outlines the formulation process of the organizational structure, the roles of each management member, and its impact on village governance dynamics. The findings reveal that a clear and functional organizational structure fosters better coordination among village apparatus, increases community participation in development, and reinforces accountability in decision-making. Therefore, the formation of the Kampung Mandiri Jaya Management structure serves as a promising model for replication in other contexts of village governance improvement.

Keywords: *village management organizational structure, village governance.*

Abstrak

Pembuatan struktur organisasi Pengurus Kampung Mandiri Jaya merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembentukan struktur organisasi yang terencana dan berbasis kebutuhan lokal dapat memperkuat kapasitas kelembagaan desa serta mendorong efektivitas pelayanan publik. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini menggambarkan proses perumusan struktur organisasi, peran masing-masing pengurus, serta dampaknya terhadap dinamika pemerintahan desa. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur organisasi yang jelas dan fungsional mampu menciptakan koordinasi yang lebih baik antar perangkat desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembentukan struktur

organisasi Pengurus Kampung Mandiri Jaya menjadi model yang potensial untuk direplikasi dalam konteks penguatan tata kelola desa lainnya.

Kata kunci: struktur organisasi pengurus kampung, tata kelola pemerintahan desa

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan desa memegang peranan krusial dalam menentukan arah dan kualitas pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Kampung Mandiri Jaya sebagai salah satu entitas desa yang tengah berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan efektivitas pemerintahan lokal, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Di antaranya adalah kurangnya struktur organisasi yang jelas dan fungsional, lemahnya koordinasi antar perangkat desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi pelaksanaan program-program pembangunan, terbatasnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, dan kurang optimalnya pemanfaatan potensi lokal.

Dalam situasi seperti ini, pembentukan struktur organisasi Pengurus Kampung Mandiri Jaya menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem tata kelola desa. Struktur organisasi yang terencana dan berbasis kebutuhan lokal dapat menjadi fondasi bagi terciptanya mekanisme kerja yang lebih terarah, akuntabel, dan partisipatif. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, alur koordinasi yang sistematis, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan desa mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara lebih efektif. Selain itu, struktur organisasi yang baik juga dapat menjadi sarana untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan, memperkuat rasa memiliki terhadap program desa, dan menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan warga. Oleh karena itu, analisis situasi ini menegaskan pentingnya pembentukan struktur organisasi Pengurus Kampung Mandiri Jaya sebagai upaya konkret dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan desa yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kemajuan bersama.

Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah tumpah darah. Desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Desa adalah suatu kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang biasa disebut Kampung mandiri jaya, Dusun (Wania), Sebutan lain untuk Kepala Desa adalah Kepala Kampung. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tuntutan dan tantangan pemerintah desa di era reformasi adalah mengembangkan good governance, di mana kepala desa mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi oleh pemerintah desa. Selama ini masyarakat desa sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dianggapnya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat dimana sering muncul kebijakan pemerintah desa yang muncul secara tiba-tiba dan pada akhirnya mendapat protes dan kritik dari masyarakat desa. Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi pemerintah desa dalam mengelola proses pemerintahan desa. Kurang transparannya pemerintah desa terhadap masyarakat akan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Pemerintah desa yang kurang transparan akan menimbulkan pemikiran yang buruk dari masyarakat desa, yaitu adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Metode kegiatan

Metode kegiatan dalam pembuatan struktur organisasi Pengurus Kampung Mandiri Jaya dimulai dengan tahap identifikasi kebutuhan dan potensi kampung melalui musyawarah bersama warga dan tokoh masyarakat. Setelah itu, dilakukan penyusunan rancangan struktur organisasi yang mencakup pembagian tugas dan fungsi secara jelas, seperti ketua, sekretaris, bendahara, serta bidang-bidang strategis sesuai kebutuhan lokal. Selanjutnya, pengurus terpilih diberikan pelatihan dasar tentang tata kelola pemerintahan desa, manajemen organisasi, dan komunikasi publik. Untuk mendukung efektivitas kerja, kegiatan ini juga mencakup penyusunan program kerja tahunan dan sistem pelaporan berkala. Evaluasi dan monitoring dilakukan secara rutin untuk memastikan struktur

organisasi berjalan sesuai tujuan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika dan aspirasi masyarakat kampung.

Tahapan kegiatan

1. Struktur kampung

- a. Pembelian kayu dan papan
- b. Pembuatan desain layout
- c. Pemesanan spanduk di asia foto
- d. Pemasangan di balai desa

Tahapan analisis kebutuhan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan struktur organisasi pengurus antara lain, kayu balok, paku tembok dan spanduk.

Tahapan persiapan

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata terdiri dari kegiatan persiapan yang dilakukan mulai dari pembekalan, dan penempatan.

1. Pembekalan

Pembekalan dilakukan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing untuk memberikan pengarahan kepada setiap mahasiswa dalam kegiatan proker disetiap masing masing posko.

2. Penempatan

Awal dari program ini yakni melakukan koordinasi dengan Dosen Pendamping Lapangan untuk turun langsung ke tempat Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata.

Rancangan evaluasi

Untuk mengukur tercapainya program pengadaan struktur pengurus di balai desa. Program yang telah dijalankan tersebut akan dikatakan berhasil jika setiap kegiatan tercapai secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pembuatan struktur pengurus dimulai dengan tahap perencanaan yang matang, di mana sekretaris posko membuat desain layout struktur pengurus terlebih dahulu dan menyusun kerangka kerja dan menentukan tujuan utama dari pembentukan kepengurusan tersebut. Setelah itu, struktur tersebut dibawa ke percetakan untuk dicetak, dan dari itu struktur/spanduk tersebut dibawa ke mebel dan dibuatkan kerangka, dari situ kami menuju ke balai desa untuk pemasangan struktur pengurus. Adapun identifikasi kebutuhan

organisasi, termasuk jumlah posisi yang diperlukan, tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan, serta. penyusunan struktur organisasi secara sistematis, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, hingga bidang-bidang yang mendukung operasional organisasi.

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	aktu Kegiatan	Tempat Kegiatan	Jumlah Mahasiswa yang Hadir/terlibat
1	Pembuatan struktur organisasi/pengurus di balai desa.	5 hari	Kampung Mandiri Jaya Distrik Wania, Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah	13 Orang

Hasil kegiatan

Adapun hasil pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan melalui observasi langsung di Kampung Mandiri Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Dari hasil observasi ditemukan bahwa di balai desa tidak terdapat struktur organisasi atau pengurus yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk membentuk struktur organisasi yang dapat mempermudah koordinasi dan pengelolaan kegiatan di desa. Selanjutnya, kelompok mahasiswa melakukan analisis kebutuhan dengan menyusun daftar material dan perlengkapan yang diperlukan untuk pembuatan struktur organisasi tersebut. Daftar kebutuhan meliputi bahan-bahan seperti kayu sebagai bahan utama, paku untuk merekatkan material, spanduk sebagai media informasi, serta peralatan pendukung lainnya yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

PEMBAHASAN

Struktur organisasi pengurus kampung merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan desa karena berfungsi sebagai pedoman yang menjelaskan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab setiap aparat kampung. Sebelum adanya papan struktur di Kampung Mandiri Jaya, masyarakat seringkali mengalami kesulitan dalam mengetahui siapa saja aparat yang berwenang dan

bagaimana mekanisme koordinasi dilakukan. Hal ini mengakibatkan interaksi antara warga dan pengurus tidak berjalan efektif serta kurangnya transparansi dalam pelayanan. Robbins dan Judge (2017) menegaskan bahwa struktur organisasi merupakan kerangka formal yang mengatur pembagian kerja serta mekanisme koordinasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Adapun Menurut Robbins & Judge (2017), struktur organisasi adalah kerangka formal yang digunakan untuk mengelompokkan, membagi, dan mengoordinasikan aktivitas anggota dalam suatu institusi. Dengan adanya struktur organisasi, setiap orang dalam lembaga mengetahui tugas, fungsi, dan wewenangnya sehingga tercipta koordinasi yang efektif. Hal ini sejalan dengan kebutuhan Kampung Mandiri Jaya untuk menampilkan susunan pengurusnya agar masyarakat lebih mudah mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.

Melalui kegiatan KKN, mahasiswa bersama aparat kampung berinisiatif membuat dan memasang papan struktur organisasi pengurus kampung di balai desa. Upaya ini memiliki nilai strategis karena secara visual menampilkan nama, jabatan, dan susunan kepengurusan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengenali pengurus kampung. Keberadaan struktur ini tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga simbol transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah kampung. Hal ini sesuai dengan pendapat Siagian (2016) bahwa organisasi tanpa struktur yang jelas akan menimbulkan kebingungan, tumpang tindih pekerjaan, serta rendahnya akuntabilitas.

Proses pembuatannya dilakukan dengan melibatkan mahasiswa, kepala kampung. Hal ini mencerminkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, di mana keterlibatan warga membuat hasil yang dicapai lebih dihargai dan dipelihara bersama. Menurut Shetunyenga (2024), partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan pedesaan karena memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Dari segi biaya, pembuatan struktur organisasi juga terbilang efisien karena hanya membutuhkan Rp290.000 dari total anggaran kegiatan, namun memiliki dampak sosial yang besar terhadap tata kelola kampung.

Manfaat langsung dari pemasangan struktur organisasi ini adalah meningkatnya efektivitas komunikasi antara masyarakat dan pengurus kampung. Warga kini dapat lebih cepat mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu, sehingga mempermudah koordinasi dan penyampaian aspirasi. Selain itu, keberadaan struktur organisasi ini memperkuat identitas kelembagaan

kampung dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparatnya. Fayol (dalam Terry, 2012) juga menekankan bahwa struktur organisasi mendukung proses manajerial melalui pembagian kerja dan alur komunikasi yang jelas.

Secara keseluruhan, pembuatan struktur organisasi pengurus kampung di Mandiri Jaya menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang lebih tertib, transparan, dan partisipatif. Kegiatan ini membuktikan bahwa intervensi sederhana namun tepat sasaran dapat memberikan dampak signifikan bagi penguatan lembaga pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Struktur Organisasi Pemerintah Desa merupakan suatu unsur penting yang harus ada di Kantor Balai Desa, dan sudah semestinya pada setiap pergantian kepengurusan perlu adanya pembaharuan. Struktur organisasi pemerintahan desa sangat berguna untuk pemetaan tugas, fungsi, dan wewenang masing masing perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Perangkat kampung mandiri jaya terbagi atas Kepala kampung, Sekretaris kampung, kaur, Bamuskam, RT dan RW. Di Kampung Mandiri Jaya ini terdapat 2 RW dan 11 RT.

KESIMPULAN

Kegiatan pembuatan struktur organisasi pengurus kampung mandiri jaya sebagai upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa, Distrik wania, kabupaten mimika. Struktur organisasi pengurus Kampung Mandiri Jaya memiliki peran strategis dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih terorganisir, transparan, dan akuntabel. Dengan struktur yang jelas, pembagian tugas dan wewenang antar pengurus menjadi lebih tegas, sehingga mencegah tumpang tindih tanggung jawab dan memperkuat koordinasi internal. Keberadaan struktur ini juga mendorong partisipasi masyarakat melalui saluran komunikasi yang efektif serta menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Secara keseluruhan, struktur organisasi yang baik akan memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education.
- Siagian, S. P. (2016). *Teori dan praktik kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Terry, G. R. (2012). *Principles of management*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
- Hadi, sutrisno, 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Shetunyenga, N. N. T. (2024). The value of community participation in rural development. *Open Journal of Social Sciences*, 12(8), 520–533.
<https://doi.org/10.4236/jss.2024.128031>
- <https://didiknews.com/kronika/pembuatan-bagan-struktur-pemerintahan-desa-dibuat-kkn-unisri-di-kerjo-karanganyar/>
- Diponegoro University. (2024). Optimalisasi infrastruktur desa: Pembuatan rambu dan penunjuk jalan. Kompasiana. (Inisiatif KKN multidisiplin dalam memperkuat aksesibilitas dan identitas desa melalui infrastruktur navigasi.)
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pasaribu, N. T. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Circle Archive*, 1(1).